



TRAGEDI PEMBAKARAN MALL YOGYA KLENDER PADA KERUSUHAN MEI 1998 : KRONOLOGI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN RAKYAT SIPIL

Raihan Savero¹⁾, Ahmad Kosasih²⁾, Hendi Irawan³⁾

¹⁻³ Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan & Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprastha PGRI

Jalan Raya Tengah No.80, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760.

*Penulis Korespondensi: raihan.savero62@gmail.com, aseng.kosasih@gmail.com,
hendiirawankesos@gmail.com

Abstract. *This study aims to explain the circumstances surrounding the burning of the Yogya Klender Mall during the May 1998 riots in East Jakarta and to examine the impact on the victims and their families. It also explores how the event affected the victims' lives—physically, psychologically, and socially. The historical method employed comprises four stages: heuristics (source collection), criticism (analysis of authenticity and credibility), interpretation (interpreting historical significance), and historiography (constructing the historical narrative). Sources include secondary literature—such as books and scholarly journals—and primary sources, including contemporary newspapers, video footage, and archival records. The findings indicate that the burning of the Yogya Klender Mall on May 15, 1998, was one of the most tragic events within the series of social riots that occurred leading up to the collapse of the New Order regime. The incident claimed the lives of over a hundred people, most of whom were trapped inside the building as a mob looted and set it ablaze. This tragedy resulted not only in a high death toll but also left a profound psychological and social impact on the families who suddenly and tragically lost their loved ones. Furthermore, the event exposed the inadequacy of state protection for civilians during a crisis and left a legacy of collective trauma that remains etched in the public memory, particularly in East Jakarta.*

Keywords: *Klender, 1998 Riots, Arson, 1998 Reformasi*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peristiwa pembakaran Mall Yogya Klender terjadi saat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta Timur, serta untuk mengetahui dampak terhadap para korban dan keluarga. Penelitian ini juga melihat bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi kehidupan korban, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Metode yang digunakan merupakan sejarah, yang mencakup empat tahapan : heuristik (pengumpulan sumber), kritik (analisis keaslian dan kredibilitas), interpretasi (penafsiran makna historis), dan historiografi (penyusunan narasi sejarah). Sumber yang digunakan meliputi literatur sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, Serta sumber primer berupa surat kabar sejawan, rekaman video sejawan, dan arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa pembakaran Mall Yogya Klender pada tanggal 15 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam rangkaian kerusuhan sosial yang terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru. Peristiwa ini menewaskan lebih dari seratus orang, sebagian besar korban terjebak di dalam gedung saat massa menjarah dan membakarnya. Tragedi ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga meninggalkan dampak mendalam secara psikologis dan sosial terhadap keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga mereka secara tiba-tiba dan tragis. Selain itu, peristiwa ini memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap warga sipil di tengah situasi krisis, serta menyisakan trauma kolektif yang hingga kini masih dikenang oleh masyarakat, terutama di Jakarta Timur..

Kata kunci: Klender, Kerusuhan 1998, Pembakaran, Reformasi 1998

1. LATAR BELAKANG

Kerusuhan merupakan tindakan pengacauan, perusakan, dan aksi anarkis yang umumnya dipicu oleh provokasi massa. Dalam konteks Indonesia, Kerusuhan Mei 1998 dilatarbelakangi oleh krisis moneter yang telah berlangsung sejak 1997, yaitu kondisi ketidakstabilan ekonomi yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar mata uang akibat menurunnya kepercayaan pasar terhadap perekonomian suatu negara (Saputra, 2013).

Krisis ekonomi yang ditandai dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok, anjloknya nilai tukar rupiah, dan maraknya pemutusan hubungan kerja memperburuk kondisi kehidupan masyarakat serta memicu keresahan yang berkembang menjadi gelombang demonstrasi. Pada awal Mei 1998, mahasiswa di berbagai daerah, seperti IKIP Jakarta dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menggelar aksi menuntut penurunan harga BBM, pengembalian kedaulatan kepada rakyat, dan penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR sebagai bentuk pertanggungjawaban atas krisis yang terjadi (Aly et al., 2020).

Di dalam aksi yang dilakukan mahasiswa, terselip juga beberapa peristiwa kerusuhan yang terjadi di luar lingkup akademis. Ada 111 titik kerusuhan di DKI Jakarta, dan yang paling banyak berasal dari daerah Jakarta Timur. Salah satu kasusnya ialah pembakaran Mall Yogya Klender.

Metode penelitian kali ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah ialah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil "sinthese" (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai" (Wasino & Sri, 2018).

Pengertian tersebut dapat disederhanakan sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Sedangkan menurut Kuntowijoyo, metode sejarah ialah "cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Langkah-langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik intern dan ekstern, analisis dan interpretasi, dan penyajian dalam bentuk tulisan." (Kuntowijoyo, 2005).

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang melalaui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Dalam metode penelitian sejarah, heuristik merupakan tahap awal yang berfungsi sebagai proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Heuristik adalah tahapan/kegiatan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa lampau (Herlina, 2020).

Sumber visual dan benda, seperti foto, bangunan, dan artefak, berperan penting dalam membantu memahami konteks peristiwa sejarah secara lebih konkret (Kuntowijoyo, 2005). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka dengan memanfaatkan sumber primer berupa surat kabar sezaman, arsip laporan Komnas HAM, dan rekaman video, serta sumber sekunder berupa buku dan tugas akhir yang relevan. Surat kabar diperoleh dari Perpustakaan Nasional, arsip laporan dari situs Komnas HAM, dan rekaman video dari kanal berita *Associated Press* di YouTube.

2. Kritik Sumber/Verifikasi

Kritik pada tahapan ini merupakan anak tangga kedua setelah tahapan heuristik dijalankan. Pada tahapan ini para sejarawan diharapkan mempunyai daya nalar kritis untuk dapat menilik sumber yang ada, apakah sekiranya relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dijalankan untuk kemudian dijadikan bahan sebagai bagian dari penulisan karya yang ditulis (Padiatra, 2020).

Kritik internal merupakan penilaian terhadap substansi atau isi sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Kritik ini berfokus pada aspek kronologis, isi, dan narasi sumber, seperti arsip, naskah, maupun berita surat kabar, untuk menilai tingkat kredibilitas dan kesesuaiannya dengan peristiwa yang diteliti.

Kemudian yang kedua ialah kritik eksternal atau yang lebih dikenal sebagai kritik atas dasar-dasar luaran dari sumber yang akan dipakai setelah melakukan penelusuran heuristik. Kritik eksternal, atau yang hemat dikatakan sebagai kritik dari bentuk luaran sumber-sumber yang telah didapatkan tersebut. Dalam konteks kritik eksternal ini kita bisa menilik kepada beberapa contoh hal yang sederhana, yakni seperti tingkat lawasnya suatu kertas dari arsip ataupun bentuk ejaan huruf dari cuplikan berita di surat kabar lawas berkategori primer yang akan kita pakai sebagai bahan rekonstruksi peristiwa yang akan dilakukan.

Berikut Kritik Internal dan Eksternal Sumber yang penulis pakai dalam penelitian skripsi:

a. Kritik Internal

Kritik internal difokuskan pada pengujian akurasi informasi, konsistensi isi berita, serta kecenderungan sudut pandang penulis dalam menyajikan peristiwa. Surat kabar sezaman dianalisis dengan membandingkan pemberitaan antar edisi dan antar media guna melihat adanya perbedaan narasi, pilihan bahasa, serta penekanan informasi, sementara buku-buku digunakan sebagai sumber pembanding untuk menilai kesesuaian fakta dan konteks historis yang disajikan. Melalui kritik internal ini, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang digunakan tidak hanya autentik secara fisik, tetapi juga dapat dipercaya secara isi sebagai dasar dalam proses interpretasi sejarah.

b. Kritik Eksternal

Dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji keaslian dan autentisitas sumber-sumber sejarah yang digunakan, khususnya surat kabar sezaman dan buku-buku yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tahap ini difokuskan pada pemeriksaan aspek fisik dan administratif sumber, seperti tahun terbit, nama penerbit, edisi, kondisi bahan cetak, serta identitas media atau penulis yang memproduksi sumber tersebut.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu tahapan dalam keilmuan sejarah yang dilalui setelah beberapa kegiatan tahapan lain terpenuhi, yang dalam hal ini ialah heuristik, atau kegiatan penelusuran sumber, serta kritik, yang berarti kegiatan penelaahan atas sumber-sumber yang telah didapatkan (Padiatra, 2020).

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bias subjektivitas. Itu sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektivitas penulisan sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi itu dua macam, yaitu analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 2005).

4. Historiografi

Pengisahan sejarah (Historiografi) itu jelas sebagai suatu kenyataan subjektif, karena setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangannya terhadap apa yang telah terjadi dengan berbagai interpretasi yang erat kaitannya dengan sikap hidup, pendekatan, atau orientasinya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya ialah objektif dan absolut, pada giliran-nya akan menjadi kenyataan yang relatif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LATAR POLITIK DI INDONESIA MENJELANG PERISTIWA

1. Pemilu 1997

Sepanjang masa Orde Baru, ABRI secara konsisten memberikan dukungan kepada Golkar, yang tercermin dari kedekatan historis kedua institusi serta dominasi tokoh militer dalam kepemimpinan Golkar. Menjelang Pemilu 1997, dukungan tersebut kembali ditegaskan melalui pernyataan sejumlah petinggi ABRI, seperti Syarwan Hamid dan R. Hartono, yang secara terbuka menyatakan keberpihakan terhadap Golkar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ABRI tidak menjalankan posisi netral sebagai institusi negara dalam penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru (Santoso & Budiarti, 2018).

Kritik terhadap sistem politik menjelang Pemilu 1997 semakin menguat dengan munculnya berbagai kelompok yang menuntut perubahan politik. Salah satu kelompok yang secara terbuka menyampaikan kritik adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD). Organisasi ini menolak campur tangan pemerintah dalam urusan internal partai politik, menuntut penghapusan Dwi Fungsi ABRI, serta menghendaki terbentuknya sistem politik yang lebih demokratis. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa menjelang Pemilu 1997 telah berkembang kritik yang tidak hanya ditujukan kepada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga kepada sistem politik Orde Baru secara keseluruhan.

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, berbagai persoalan politik yang telah berkembang sebelumnya semakin memperbesar tuntutan perubahan yang pada akhirnya bermuara pada gerakan Reformasi 1998 (Aryanto, 2023).

Di Jakarta, bentrokan terjadi antara massa konvoi Golkar dan pendukung PPP yang kemudian meluas ke berbagai wilayah ibu kota. Sementara itu, Kerusuhan Banjarmasin yang menjadi kerusuhan terbesar selama kampanye dipicu oleh ketegangan antara massa kampanye Golkar dan masyarakat setempat hingga menyebabkan ratusan bangunan rusak serta menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar (Trijono, 1997).

2. Peristiwa Kudatuli

Konflik Kudatuli berawal dari perselisihan kepemimpinan PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi, yang masing-masing mengklaim keabsahan kepemimpinan partai. Perbedaan pandangan tersebut memunculkan dualisme kepemimpinan dan memperuncing konflik internal PDI (Kurniawan, 2025).

Di tengah konflik tersebut, Megawati dan para pendukungnya tetap mempertahankan keberadaan mereka di Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Kantor tersebut kemudian menjadi pusat perlawanan politik bagi kelompok yang menolak hasil Kongres Medan. Situasi ini membuat kantor DPP PDI tidak hanya berfungsi sebagai kantor partai, tetapi juga menjadi simbol pertentangan antara kedua kubu yang saling mengklaim legitimasi kepemimpinan partai (Kurniawan, 2025).

Ketegangan akhirnya berubah menjadi bentrokan terbuka pada pagi hari 27 Juli 1996. Massa pendukung Soerjadi mulai melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving block, sementara pendukung Megawati membalas dengan melemparkan berbagai benda yang tersedia di sekitar lokasi. Bentrokan tersebut semakin meluas ketika sejumlah orang berbaju merah menyerang kompleks kantor dan melemparkan benda-benda yang memicu kebakaran. Dalam waktu singkat, situasi berubah menjadi kerusuhan yang sulit dikendalikan.

Kerusuhan kemudian meluas hingga Malam hari. Massa yang berkumpul di kawasan Jalan Proklamasi melakukan pembakaran terhadap sejumlah bangunan, termasuk toko dan fasilitas usaha yang berada di sekitar lokasi. Aksi tersebut berlangsung selama beberapa jam dan menyebabkan kerusakan pada berbagai bangunan pemerintah maupun swasta di sejumlah wilayah Jakarta. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik internal partai telah berkembang menjadi kerusuhan sosial-politik yang berdampak luas bagi masyarakat (Kurniawan, 2025).

3. PRD Dalam Politik Orde Baru

Kemunculan PRD sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan gerakan mahasiswa dan organisasi rakyat pada awal 1990-an. Organisasi ini lahir dari proses konsolidasi berbagai kelompok yang menuntut perluasan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan sistem politik yang dianggap terlalu terkonsentrasi pada kekuasaan negara. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya PRD telah menempatkan dirinya sebagai organisasi politik yang memiliki agenda perubahan terhadap sistem politik yang berlaku pada masa Orde Baru (Kurniawan, 2025).

PRD dideklarasikan sebagai partai politik pada 22 Juli 1996 dengan program-program politik yang berkonfrontasi langsung dengan rezim Orde Baru. PRD meyakini bahwa dengan mencabut pilar-pilar kekuasaan Orde Baru (seperti 5 Paket UU Politik 1985, dan Dwi Fungsi ABRI) maka kehidupan demokratis di Indonesia akan segera dirasakan. Usaha tersebut bukan tanpa hambatan, selang 5 hari setelah mendeklarasikan diri sebagai partai politik, PRD dituduh sebagai dalang aksi kerusuhan di Jl. Diponegoro Jakarta Pusat. Beberapa pimpinan partai kemudian ditangkap dan diadili, dan akhirnya PRD ditetapkan sebagai organisasi terlarang melalui SK Mendagri No.210-221 Tahun 1997 (Susilo, 1999).

PRD berkembang dengan latar belakang pemikiran yang dipengaruhi tradisi gerakan kiri dan sosialisme. Dalam perkembangannya, organisasi ini berupaya membangun basis gerakan melalui pengorganisasian mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok masyarakat lainnya. Strategi tersebut berbeda dengan pola politik yang dominan pada masa Orde Baru yang cenderung membatasi ruang gerak organisasi politik di luar saluran resmi negara (Kurniawan, 2025).

Menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, PRD membangun struktur perlawanan yang melibatkan masyarakat miskin kota, buruh, mahasiswa, dan pendukung Megawati Soekarnoputri untuk memperkuat aksi kolektif serta membangun sentimen terhadap rezim Orde Baru. Upaya tersebut berkontribusi pada menguatnya gerakan Reformasi 1998 sebagai wujud mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto (Susilo, 1999).

B. RANGKAIAN KERUSUHAN MEI 1998 DI JAKARTA

1. Tragedi Trisakti

Salah satu tragedi paling memilukan terjadi pada tragedi 12 Mei 1998 atau yang biasa dikenal dengan Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977–1998), Hafidin Royan (1976–1998), dan Hendriawan Sie (1975–1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada (Museum Tragedi 12 Mei 1998).

Tragedi Trisakti menjadi titik balik dalam perkembangan politik nasional. Penembakan terhadap mahasiswa dinilai Komnas HAM sebagai tindakan yang mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memicu kemarahan masyarakat dan memperdalam krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru. Peristiwa ini kemudian mempercepat gelombang protes yang berujung pada Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta (Julianti et al., 2025).

Sebelum 12 Mei 1998, Universitas Trisakti tidak dikenal sebagai kampus yang aktif melakukan demonstrasi politik, sehingga aksi turun ke jalan pada hari itu menjadi salah satu mobilisasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswanya. Namun, penembakan yang terjadi mengakibatkan empat mahasiswa meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka, sehingga memicu gelombang simpati masyarakat serta meningkatkan ketegangan sosial dan politik yang kemudian berujung pada pecahnya Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya.

Keesokan harinya, para mahasiswa Trisakti dan para perwakilan dari berbagai kampus di Jakarta menggelar sebuah acara untuk memberikan penghormatan kepada rekan-rekan mereka yang telah gugur pada aksi 12 Mei. Selain mahasiswa, massa di luar kampus pun mulai berdatangan. Semakin lama, banyak dari massa luar kampus yang berkumpul dan melakukan aksi pengerusakan. Bersamaan dengan itu, aparat mulai mendekati kampus Trisakti (Bianpoen & Buntarian, 2002).

Acara yang berlangsung khidmat pun mulai terganggu oleh tembakan gas air mata aparat ke arah massa yang berada di luar kampus. Akibatnya, massa yang berada di luar kampus pun semakin menjadi jadi dengan lebih beringas melakukan pengrusakan terhadap apa pun yang berada di sekitar mereka.

2. Kerusuhan 12-15 Mei 1998

Aksi pengrusakan oleh massa yang berada di luar kampus pun semakin menjalar ke beberapa titik, seperti di jalan Daan Mogot, di mana massa melakukan pengrusakan dan pembakaran kepada beberapa kantor bank yang berada di daerah tersebut, Massa di luar kampus pun ikut mengajak mahasiswa yang berada di dalam kampus untuk turun ke jalan, namun aksi ini ditolak oleh mahasiswa yang berada di dalam kampus. Ratusan orang pun ikut menjadi korban kekerasan pada saat itu (Bianpoen & Buntarian, 2002).

Pada 14 Mei 1998, kerusuhan di Jakarta mencapai puncaknya dengan aksi penjarahan, perusakan, dan pembakaran di berbagai pusat perdagangan, termasuk Pertokoan Topaz (Tomang Plaza) serta sejumlah kawasan di Jakarta Selatan seperti Supermarket Robinson, Ramayana, GORO, Hero Mampang, gedung BCA, Pasar Minggu, Manggarai, dan Kebayoran Lama. Selain menjarah berbagai tempat usaha, massa juga merusak dan membakar kendaraan di sekitar lokasi, sehingga peristiwa tersebut menjadi puncak Kerusuhan Mei 1998 yang dipicu oleh kemarahan masyarakat pasca-Tragedi Trisakti (Yudha, 1998).

Kerusuhan pada 14 Mei 1998 meluas ke berbagai wilayah Jakarta, seperti Mangga Besar, Sawah Besar, Pasar Baru, Pasar Senen, dan Salemba. Massa melakukan penjarahan, pembakaran kendaraan, perusakan fasilitas kepolisian, lembaga perbankan, showroom mobil, serta berbagai toko dan *department store*. Meluasnya aksi kekerasan tersebut memaksa banyak pemilik usaha meninggalkan tempat mereka untuk menyelamatkan diri dari amukan massa.

Pada keesokan harinya, sisa-sisa kerusuhan masih tampak, seperti yang terjadi di kawasan Mangga Dua. Benda-benda yang terjadi di Pluit, Muara Karang di mana masih banyak warga yang menonton sisa-sisa kerusuhan dan aparat pun mengambil sikap untuk membubarkan massa tersebut dengan gas air mata, hal ini memicu protes warga yang menganggap aparat keamanan terlalu berlebihan dalam aksinya. Pada hari yang sama, di belahan lain ibu kota terdapat peristiwa yang sangat tragis di mana masih banyak warga yang berdatangan ke Yogya Plaza Klender bukan untuk melakukan aksi penjarahan, namun untuk mencari kerabat atau keluarga mereka yang menjadi korban kerusuhan pembakaran yang terjadi sehari sebelumnya di tempat itu.

3. Meredanya Kerusuhan

Kerusuhan mulai mereda setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang semakin menguat akibat kegagalan pemerintah mengatasi krisis politik dan ekonomi. Berdasarkan *Harian Kedaulatan Rakyat* edisi 22 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka setelah rencana pembentukan Komite Reformasi dan perombakan Kabinet Pembangunan VII tidak mendapat dukungan.

Selanjutnya, sesuai Pasal 8 UUD 1945, jabatan Presiden diserahkan kepada B. J. Habibie sebagai Wakil Presiden (Bianpoen & Buntarian, 2002).

Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, B. J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan untuk menangani krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang melanda Indonesia. Pemerintah memprioritaskan pemulihan ekonomi melalui restrukturisasi perbankan, rekonstruksi perekonomian nasional, likuidasi bank bermasalah, penguatan nilai tukar rupiah, serta pelaksanaan reformasi ekonomi sesuai ketentuan IMF (Aziz et al., 2025).

Masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie menjadi awal terbukanya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Pada periode tersebut, pemerintah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi melalui rapat umum maupun demonstrasi. Meskipun demikian, setiap penyelenggaraan demonstrasi tetap diwajibkan memperoleh izin dari kepolisian serta dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Emita, 2018).

Meskipun mengalami kerugian besar akibat Kerusuhan Mei 1998, sebagian besar pengusaha etnis Tionghoa memilih bertahan dan membangun kembali usahanya sebagai bentuk komitmen terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi. Pasca-kerusuhan, beredarnya isu serangan susulan juga mendorong masyarakat di berbagai wilayah mengadakan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan.

C. TRAGEDI PEMBAKARAN MALL YOGYA PLAZA KLENDER 1998

1. Titik Awal Kerusuhan Mall Yogya Plaza Klender 1998

Pada pagi hari 14 Mei 1998, pukul 09:00, aktivitas di Yogya Plaza Klender pada awalnya masih berlangsung sebagaimana biasa. Plaza sempat dibuka untuk umum, namun sekitar dua jam kemudian pihak manajemen menginstruksikan agar seluruh kegiatan operasional dihentikan dan seluruh karyawan meninggalkan gedung. Tidak lama setelah pusat perbelanjaan ditutup, massa mulai berdatangan dan berkumpul di sekitar kawasan Yogya Plaza. Menjelang pukul 10.40 WIB, jumlah kerumunan semakin bertambah, termasuk sejumlah pelajar yang dipulangkan lebih awal dari sekolah sehingga ikut berada di sekitar pusat pertokoan tersebut. Kondisi ini menyebabkan suasana di sekitar Yogya Plaza berubah menjadi semakin ramai dan pada tahap ini belum terjadi tindakan anarkis yang mengarah pada penjarahan maupun pembakaran. Pada sekitar pukul 12.00 WIB, situasi mulai memanas ketika terjadi tawuran antarpelajar di Jalan I Gusti Ngurah Rai, yang salah satunya melibatkan pelajar STM Tubun. Aksi saling lempar batu berlangsung di sekitar fly over Klender hingga sebagian pelajar berlari menuju Stasiun Klender. Di lokasi tersebut mereka berhadapan dengan sekelompok massa yang berjumlah sekitar dua puluh orang.

Berdasarkan kesaksian, orang-orang itu memiliki postur tubuh yang cukup tegap, atletis, dan berambut cepak. Beberapa orang dari kelompok massa terdengar meneriakkan seruan untuk menyerang para pelajar, kemudian melakukan penyerangan menggunakan kayu, batu, dan batang besi. Para pelajar yang berusaha menyelamatkan diri akhirnya berlari menuju kawasan Yogya Plaza. Sejumlah saksi juga menyebutkan adanya kelompok orang yang diduga sengaja memprovokasi

keadaan dengan berpura-pura bertikai dan mengarahkan perhatian masyarakat ke sekitar pusat perbelanjaan sehingga massa terus berdatangan.

Kondisi semakin tidak terkendali ketika beberapa orang mendatangi kumpulan pelajar dan mengalihkan sasaran mereka dari tawuran menuju pertokoan milik warga keturunan Tionghoa di sekitar Yogya Plaza. Tidak lama kemudian, pelemparan terhadap bangunan-bangunan toko mulai terjadi dan segera diikuti oleh massa yang sejak pagi telah berada di lokasi. (Jusuf, et. al., 2005).

2. Puncak Kerusuhan

Berdasarkan kesaksian Amiruddin, sekitar pukul 13.00 WIB massa berhasil menjebol pintu masuk pusat pertokoan dan mulai memasuki area bangunan. Setelah berhasil masuk ke dalam kompleks pertokoan, massa segera melakukan aksi penjarahan terhadap berbagai barang yang berada di dalam gedung. Menurut kesaksian tersebut, sebagian besar massa yang terlibat dalam penjarahan terdiri atas kaum ibu dan anak-anak yang mengambil berbagai barang dari toko-toko yang telah berhasil dimasuki. Peristiwa tersebut menandai dimulainya aksi penjarahan secara terbuka di dalam pusat pertokoan yang kemudian berlangsung dengan melibatkan kerumunan massa dalam jumlah yang semakin besar (Aziz et al., 2025).

Setelah massa berhasil memasuki Yogya Plaza Klender, aksi penjarahan berlangsung secara terbuka dan melibatkan kerumunan dalam jumlah yang terus bertambah. Banyak orang terlihat keluar masuk gedung untuk mengambil berbagai barang, bahkan sebagian di antaranya memanfaatkan taksi, bajaj, maupun kendaraan lain sebagai sarana mengangkut hasil jarahan. Selama aksi penjarahan berlangsung, pintu utama plaza dalam keadaan terbuka sehingga memudahkan arus keluar masuk massa. Pada saat yang sama, tidak terlihat adanya pengamanan dari aparat kepolisian maupun militer di sekitar lokasi, kecuali beberapa petugas keamanan (satpam) yang berada di sekitar restoran McDonald's sebelum kebakaran terjadi. Di tengah berlangsungnya penjarahan, muncul titik api di lantai dua Yogya Plaza yang berasal dari pakaian yang dibakar oleh para penjarah untuk menerangi bagian dalam gedung karena aliran listrik telah padam. Api tersebut sempat berhasil dipadamkan, namun tidak lama kemudian kembali muncul titik-titik api di beberapa lokasi lain di dalam gedung hingga kobaran api semakin membesar, meskipun pada saat itu masih terdapat banyak orang yang berada di dalam bangunan.

Sejumlah saksi kemudian memberikan keterangan mengenai kedatangan sebuah truk besar berwarna oranye berpelat merah bertuliskan "DPU" ke kawasan Yogya Plaza. Truk tersebut mengangkut sekitar lima puluh orang dengan pakaian yang beragam, mulai dari pakaian preman, kaus singlet, hingga seragam sekolah. Menurut kesaksian warga, mereka tampak saling mengenal, bertubuh tegap, berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, dan membawa jeriken berwarna putih sambil berlari menuju gedung Yogya Plaza. Beberapa saat kemudian mereka kembali ke truk tanpa lagi membawa jeriken, dan tidak lama sesudahnya terdengar ledakan keras dari bagian belakang gedung yang segera diikuti munculnya asap tebal. Kesaksian lain juga menyebutkan adanya dua truk yang menurunkan sekitar lima puluh orang dengan membawa jeriken berisi bensin, sementara salah seorang di antaranya terlihat memimpin kelompok tersebut menggunakan handy talkie (HT). Sejumlah barang

yang mudah terbakar, seperti plastik, tirai, dan berbagai benda lain, dikumpulkan menjadi satu, disiram menggunakan bensin, kemudian dibakar.

Berdasarkan kesaksian Amiruddin, sekitar pukul 15.30 WIB kobaran api mulai terlihat di lantai dasar gedung Yogya Plaza yang terdiri atas lima lantai. Menurut keterangannya, sekitar 50 orang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai tiga menuju pelataran parkir yang telah dialasi sejumlah kasur busa, sedangkan tujuh orang lainnya turun dari lantai dua menggunakan seutas tali. Seluruh korban yang berhasil keluar tersebut dinyatakan selamat, meskipun mengalami berbagai luka akibat upaya penyelamatan diri yang dilakukan. Akan tetapi, masih banyak orang lain yang tidak sempat meninggalkan gedung ketika api semakin membesar. Teriakan minta tolong dari dalam bangunan terdengar saling bersahutan, namun tidak seorang pun mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Hingga tengah Malam, api dilaporkan masih terus berkobar di sebagian area Yogya Plaza, sehingga proses penyelamatan maupun penanganan kebakaran belum dapat dilakukan secara menyeluruh (Bianpoen & Buntarian, 2002).

3. Meredamnya Kerusakan dan Evakuasi Korban

Pada keesokan harinya, sekitar pukul 06.00 WIB, sejumlah warga yang kehilangan anggota keluarganya memasuki gedung Yogya Plaza untuk mencari keberadaan para korban. Beberapa jam kemudian, petugas dari Palang Merah Indonesia (PMI) tiba di lokasi untuk melakukan proses evakuasi terhadap para korban dan selanjutnya membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Menurut Sri Indahyati selaku Sekretaris PMI Jakarta Timur sekaligus ketua tim evakuasi, sebanyak 118 jenazah berhasil dievakuasi dari dalam gedung. Namun, sebagian besar jenazah berada dalam kondisi yang sulit dikenali akibat kebakaran. Hingga sore hari, baru 16 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh pihak keluarga, yang pada umumnya mengenali korban berdasarkan pakaian yang masih melekat pada tubuh mereka (Bianpoen & Buntarian, 2002).

Sri Indahyati juga menjelaskan bahwa seluruh jenazah yang berhasil ditemukan berasal dari lantai satu, lantai dua, dan sebagian lantai tiga gedung Yogya Plaza. Proses evakuasi tidak dapat dilanjutkan ke bagian lain di lantai tiga maupun ke lantai empat dan lantai lima karena suhu di dalam bangunan masih sangat tinggi akibat kebakaran. Oleh karena itu, tim evakuasi meminta bantuan petugas Pemadam Kebakaran untuk menurunkan suhu di dalam gedung sebelum pencarian dapat dilanjutkan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperkirakan masih terdapat sejumlah jenazah yang berada di lantai-lantai yang belum berhasil dijangkau. Di sisi lain, seorang petugas PMI yang tidak bersedia disebutkan namanya menyatakan keyakinannya bahwa sebagian besar korban yang meninggal merupakan massa penjarah.

4. Respon Aparat Keamanan

Berdasarkan sejumlah catatan mengenai peristiwa tersebut, peran pemerintah, khususnya aparat keamanan, dinilai sangat terbatas pada saat Tragedi Yogya Plaza Klender berlangsung. Selama kerusakan terjadi, kehadiran aparat keamanan di lokasi hampir tidak terlihat sehingga situasi di sekitar pusat perbelanjaan tidak memperoleh pengamanan yang memadai. Dalam berbagai kesaksian yang dihimpun, hanya tampak sebuah mobil patroli aparat keamanan berada di sekitar lokasi kejadian.

Namun, dengan jumlah massa yang sangat besar pada saat itu, kehadiran satu kendaraan patroli tersebut tidak mampu mengendalikan maupun menghentikan jalannya kerusuhan yang terus berkembang. Akibatnya, aksi massa berlangsung tanpa adanya pengamanan yang efektif hingga situasi di lokasi semakin tidak terkendali (Jusuf et al., 1998).

Berdasarkan berbagai kesaksian yang dihimpun dalam buku Kerusuhan Mei 1998: Fakta, Data dan Analisa, sejumlah orang yang diduga berperan sebagai provokator dalam rangkaian peristiwa di Yogya Plaza Klender digambarkan memiliki karakteristik yang relatif seragam. Para saksi menyebutkan bahwa mereka umumnya berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, bertubuh tegap, sebagian berambut cepak, mengenakan pakaian preman maupun seragam sekolah, serta terlihat membawa handy talkie (HT). Selain itu, mereka juga tampak bergerak secara terorganisasi, saling mengenal satu sama lain, dan menjalankan tindakan secara terkoordinasi. Dalam beberapa kesaksian juga disebutkan bahwa kelompok tersebut datang menggunakan truk berpelat merah bertuliskan "DPU", membawa jeriken berwarna putih yang diduga berisi bahan bakar, kemudian meninggalkan lokasi setelah terdengar ledakan dan muncul kobaran api dari dalam gedung Yogya Plaza.

5. Dampak Terhadap Keluarga Korban dan Rencana Rekonsiliasi

Tragedi kebakaran Yogya Plaza Klender tidak hanya meninggalkan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga membawa dampak yang berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Di Kampung Jati, misalnya, terdapat sejumlah warga yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Pasca-kerusuhan, para penyintas maupun keluarga korban tidak hanya menghadapi kehilangan anggota keluarga, tetapi juga harus menerima stigma dari sebagian masyarakat yang menganggap para korban sebagai pelaku penjarahan. Stigma tersebut bahkan diikuti dengan adanya permintaan agar barang-barang yang diduga berasal dari pusat perbelanjaan dikembalikan. Menanggapi hal itu, Binari mengungkapkan kekecewaannya dengan menyatakan, "Lha gimana mau mengembalikan, anakku saja tak kembali dan dia ke sana diajak untuk nonton." Pernyataan tersebut mencerminkan beban yang harus ditanggung keluarga korban, yang selain kehilangan orang terdekat juga menghadapi penilaian negatif dari lingkungan sekitar (Lestari, 2018).

Lebih dari dua dekade setelah Tragedi Mei 1998, keluarga korban masih menyimpan harapan agar peristiwa tersebut tidak dilupakan oleh masyarakat maupun negara. Ruminah, salah seorang ibu korban Tragedi Yogya Plaza Klender, mengungkapkan keinginannya agar setiap tahun diselenggarakan peringatan terhadap tragedi tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para korban sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar keluarga korban yang memiliki pengalaman serupa. Menurutnya, peringatan tahunan penting untuk terus dilakukan agar generasi muda, termasuk Generasi Z dan Generasi Alpha, dapat mengetahui serta memahami peristiwa yang pernah terjadi. Ia juga mengenang saat-saat ketika keluarganya mencari anaknya hingga larut Malam, yang menyebabkan dirinya mengalami kelelahan dan tekanan batin, sebelum akhirnya mengetahui bahwa sang anak menjadi salah satu korban yang meninggal dalam kebakaran Mall Klender bersama sejumlah korban lainnya (Munir, 2026).

Dalam wawancaranya, Amin Darwin menceritakan bahwa putra sulungnya, Yen Karyana, lulusan Fakultas Sastra Prancis Universitas Indonesia, menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi kebakaran Yogya Plaza Klender pada Kerusuhan Mei 1998. Menurut Darwin, peristiwa tersebut bukan sekadar kebakaran biasa, melainkan terdapat indikasi bahwa gedung sengaja dibakar berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Ia menjelaskan bahwa sebelum kejadian, putranya sempat berada di lokasi dan berupaya menolong anak-anak sekolah yang masih terjebak di lantai atas karena teringat kepada keponakannya. Setelah anaknya tidak kunjung pulang, keluarga melakukan pencarian ke berbagai rumah sakit hingga akhirnya menemukan jenazah yang sudah tidak utuh. Identifikasi korban dilakukan melalui barang-barang yang masih tersisa, seperti ikat pinggang dan sebagian pakaian yang dikenakan putranya. Di akhir wawancara, Darwin menyampaikan bahwa pengorbanan putranya memiliki makna bagi perjuangan generasi penerus untuk memperjuangkan perubahan di Indonesia.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kerusuhan Mei 1998 tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang pada akhir masa pemerintahan Orde Baru. Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), peristiwa Kudatuli, pembatasan ruang demokrasi, hingga meningkatnya gerakan oposisi seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi bagian dari dinamika politik yang memperlihatkan semakin melemahnya legitimasi pemerintahan Soeharto.

Krisis ekonomi 1997–1998 memicu ketidakpuasan masyarakat dan gelombang demonstrasi mahasiswa yang mencapai puncaknya setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, kemudian berkembang menjadi Kerusuhan Mei 1998 pada 13–15 Mei di berbagai wilayah Jakarta dan berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Kerusuhan tersebut mengakibatkan kerusakan besar terhadap fasilitas umum, pusat perdagangan, kendaraan, dan permukiman, serta menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dalam Tragedi Yogya Plaza Klender, yang hingga kini masih menyisakan trauma bagi keluarga korban dan mendorong upaya untuk memperjuangkan keadilan serta pengungkapan kebenaran.

Penyelesaian Kerusuhan Mei 1998 menunjukkan bahwa upaya pencarian keadilan belum sepenuhnya tuntas. Meskipun pemerintah telah menempuh langkah non-yudisial melalui pemulihan bagi korban, sebagian besar keluarga korban tetap menuntut penyelesaian yudisial berupa pengungkapan fakta, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, Tragedi Mei 1998 menjadi pengingat pentingnya penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi agar peristiwa serupa tidak terulang.

DAFTAR REFERENSI

Aly, R., Witoelar, R., & Witoelar, E. (2020). *Rachmat & Erna: Bersama di Dua Jalan Berbeda Berdua di Satu Jalan Bersama*. Naratama.

- Aryanto, D. (2023). *Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977 : Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto*. 4(2), 108–116.
- Carla Bianpoen, Nani Buntarian, A. Y. (2002). *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*
- Dien, M. M., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar. Cet 2*, (Depok: Kencana.
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu sejarah: Metode dan praktik*. JSI Press.
- Prof. Dr. Nina Herlina, M. S. (2020). *Metode Sejarah (Revisi 202)*. Satya Historika.
- Prof. Dr Topo Santoso, S. M., & Dr. Ida Budiarti, S. M. (2018). *Pemilu di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wasino, M., & Endah Sri, H. (2018). *Metode penelitian sejarah: dari riset hingga penulisan*.
- Aziz, M. I., Mildan, J., Hikam, M. W., & Sujana, A. M. (2025). *Tragedi Mei 1998 : Bara Krisis Moneter , Api Sentimen Rasial , dan Jejak Reformasi yang Terbakar*. 2(3), 376–397.
- Ester I Jusuf, Hotma T, Olisias G, S. F. (1998). *Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data & Analisa : Mengungkap Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*.
- Indro Sugianto. (1997). *Pemilu dan Demokratisasi di Indonesia (Catatan Kecil di Seputar Pelaksanaan Pemilu 1997)*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2(2), 1–8.
- Julianti, A. D., Dimonti, R. R., Ardhitama, M. G. A., Sobari, A. M., & Puannandini, D. A. (2025). *Keadilan Yang Tertunda: Pelanggaran Ham Dalam Insiden Trisakti 98 Dan Implikasinya Terhadap Gerakan Reformasi*. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(7).
- Kurniawan, H. (2025). *Peristiwa Kudatuli 1996 : Gerakan Pertarungan Politik di Masa Orde Baru Rakyat dan*. 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v7i1.28805>
- Perdana, H. A. (2021). *Political turmoil during the 1997 election at the end of the new order government*. Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 1(1), 32–37.
- Santhoso, F. H., & Hakim, M. A. (2012). *Deprivasi relatif dan prasangka antar kelompok*. Jurnal Psikologi UGM, 39(1), 121–128.
- Saputra, B. E. (2013). *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen, II(4), 1–9.
- Susilo, C. (1999). *DARI AKSI HINGGA PESTA DEMOKRASI : DINAMIKA PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK*. Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1–14.

- Trijono, L. (1997). *Paradoks Demokrasi di Indonesia : Kerusuhan Pada Massa Kampanye Pemilu 1997*. Jurnal Sosiologi Staf Pengajar : Universitas Gadjah Mada, 1(2), 1–14.
- Miftahul Munir. (2026). *Tangis Ruminah dan Kus Saat Kenang Anak Korban Pembakaran Mal Klender 1998*. wartakota.tribunnews.com.
- Sri Lestari. (2018). *Tragedi Mei 1998 : Kenangan dua ibu yang kehilangan anaknya*. BBC Indonesia.